

**PERAN DEWAN SYARI'AH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DALAM PENERAPAN ETIKA BERPOLITIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



**M. FARIS
NIM. 2102214**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

PENGESAHAN

Skripsi Saudara :

Nama : M. Faris

Nim : 2102214

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul : "PERAN DEWAN SYARI'AH PARTAI Keadilan
SEJAHTERA DALAM PENERAPAN ETIKA BERPOLITIK"

Telah dimunafiqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang, pada tanggal :

Semarang, 31 Januari 2007

dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana (S.1) Tahun
Akademik 2006 guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang,

Semarang, 31 Januari 2007
Sekretaris Sidang,

Drs. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 150 254 254

Drs. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 150 276 621

Penguji I

Penguji II

Dr. Imam Yahya, M. Ag.
NIP. 150 275 331

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.
NIP. 150 207 762

Pembimbing,

Drs. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 150 276 621

Dr. Agus Nurhadi, MA.
Jl. Wismasari V/2 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (lima) eksemplar	Kepada
Hal : Naskah Skripsi	Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
a.n. Sdr. M. Faris	IAIN Walisongo Semarang
	Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama	: M. Faris
NIM	: 2102214
Jurusan	: Siyasah Jinayah
Judul Skripsi	: PERAN DEWAN SYARI'AH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PENERAPAN ETIKA BERPOLITIK

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Januari 2006
Pembimbing,

Dr. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 150 250 148

MOTTO

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

﴿البقرة : ٣٢﴾

“Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah
Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkau lah
Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(QS. Al-Baqarah 2:32)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Januari 2007

Deklarator,

M. Faris

ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu kendaraan yang digunakan dalam proses demokratisasi. Mahfudz MD mengatakan bahwa konfigurasi partai politik sangat berpengaruh terhadap sebuah kebijakan, ini berarti partai politik yang berkuasa tentunya mempunyai pengaruh besar terhadap proses legitimasi kebijakan.

Setelah adanya kebijakan liberalisasi politik dengan diberlakukannya sistem multi partai, PKS hadir dengan membawa isu moral dan menunjukkan moralitas politik yang santun dalam setiap aksi dan gerakan politiknya. Dalam rangka pencitraan partai dakwah yang menjunjung ajaran-ajaran Islam, PKS dibackup oleh sebuah lembaga yang dinamakan Dewan Syari'ah. Peran Dewan Syari'ah di intern partai adalah sebagai wadah pembinaan kader serta memberikan *ta'shil syar'i* terhadap kebijakan partai.

Selain memberikan *ta'shil syar'i*, Dewan Syari'ah juga bertanggung jawab terhadap pengawasan atas aplikasi *syar'i* dalam perilaku kader-kader PKS, walaupun Pengawasan ini melibatkan seluruh komponen Dewan Syari'ah, mulai dari tingkat pusat (DSP), wilayah (DSW) sampai tingkat daerah (DSD). Jika anggota Dewan Syari'ah mendapati kader yang menyimpang atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam seperti melakukan suap, penipuan, dan pembohongan publik dalam berkampanye, maka Dewan Syari'ah berhak memberikan teguran atau peringatan bahkan Dewan Syari'ah mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi agar kader yang bersangkutan dikeluarkan dari partai.

Dalam kontemplasi politik Indonesia, keberadaan Dewan Syari'ah dapat menjadi *oase* bagi masyarakat akan pemenuhan sebuah etika politik. Sikap proaktif Dewan Syari'ah dalam penerapan etika berpolitik dimanifestasikan dalam seruan fatwa-fatwanya kepada seluruh partai yang ada di Indonesia, terlebih fatwa ini harus dilaksanakan oleh semua kader-kader PKS.

KATA PENGANTAR

Alamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan memberikan petunjuk baginya jalan kebaikan dan keburukan. Dan yang telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kancah perpolitikan di Indonesia memang patut dipertimbangkan. Sebagaimana Visi yang dimiliki oleh PKS yaitu membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman, membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami, mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problematika dan tuntutan masa mendatang, membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa.

Dalam mewujudkan visi tersebut PKS dengan di-*back up* oleh Dewan Syari'ah mampu menciptakan citra partai yang kemudian PKS dikenal sebagai partai yang santun dan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam koridor kepartaian, kewenangan dan tugas Dewan Syari'ah adalah memberikan *ta'shil syar'i* terhadap kebijakan partai dan mengawasi pelaksanaannya, memberikan jawaban dan solusi *syar'i* terhadap berbagai masalah yang dihadapi partai dan anggotanya. Peran inilah yang kemudian menjadikan PKS sebagai satu-satunya partai Islam yang mengalami peningkatan dalam perolehan suara pada pemilu 2004.

Padahal dibalik fenomena itu, masyarakat sedang mengalami paranoid yang diakibatkan oleh kelakuan para partai politik yang selalu mengingkari dan mengkhianati rakyat. Bahkan Banyak tinjauan dari luar yang mengatakan bahwa negara kita adalah negara yang secara etis dan moral sosial politik dan ekonomi termasuk lunak. Kehadiran PKS seolah-olah menjadi *oase* bagi masyarakat akan pemenuhan sebuah etika politik. Ditengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap

etika partai politik, Partai Keadilan Sejahtera tampil dengan membawa isu moral dan menunjukkan etika politik yang santun dalam aksi dan gerakan politiknya.

Isu moral yang diusung oleh PKS ternyata tidak hanya isapan jempol, sebagai partai Islam tentunya moralitas yang dibangun PKS adalah moralitas yang berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam. Yaitu prinsip-prinsip sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an dan hadits, diantaranya mengenai prinsip untuk menjadikan kekuasaan sebagai amanah (kepemimpinan), musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, perdamaian dan keselamatan, kesejahteraan masyarakat dan ketaatan rakyat. Walaupun Islam sendiri tidak menerangkan mengenai ajaran moralitas politik secara eksplisit, namun roh-roh perilaku politik yang diwakili oleh pembelaan kepentingan publik telah diterangkan dalam Islam.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang berjasa dalam menyumbangkan gagasan, meluangkan waktu serta tenaganya untuk memotivasi penulis. Melalui lembar terbatas ini penulis mengucapkan terima kasih. Mereka adalah :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi ijin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
2. Kepada Kajur Siayasah Jinayah dan seluruh staf yang telah memberikan ide-ide dalam merumuskan permasalahan yang penulis kaji.
3. Bapak Dr. Agus Nurhadi, M.A yang telah meluangkan waktu dan tenaganya memberikan kritik dan arahan dalam proses pembuatan karya ilmiah ini.
4. Kepada seluruh pengurus Dewan Syari'ah Wilayah Jawa Tengah dan kader-kader PKS yang sudi meluangkan waktunya untuk sharing ide.
5. Semua teman-teman yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dalam waktu yang dicita-citakan.

Di akhir tulisan ini, penulis mengajak seluruh pembaca budiman untuk turut memberikan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan karya ini selanjutnya. Penulis hanya bisa berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai upaya perbaikan moralitas bangsa.

Semarang, Januari 2006

M. Faris

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
 BAB II : ISLAM DAN ETIKA POLITIK	 13
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Etika	13
B. Dimensi Etika Politik	15
C. Agama Sebagai Dasar Etika	18
1. Kelahiran Etika Gobar	19
2. Islam Sebagai Sumber Etika	22
 BAB III : PERAN DEWAN SYARI'AH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	 34
A. Profil Dewan Syari'ah PKS	34
B. Kedudukan, Tugas dna Wewenang Dewan Syari'ah dalam Partai Keadilan Sejahtera	38

C. Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah PKS Kaitannya dengan Pembinaan Etika Berpolitik	41
 BAB IV : ANALISIS PERAN DEWAN SAYRI'AH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PARTAI Keadilan SEJAHTERA (PKS) DALAM PENERAPAN ETIKA BERPOLITIK	 48
A. Peran Dewan Syari'ah PKS Sebagai Lembaga Fatwa kaitannya dengan Penerapan Etika Politik.....	48
1. Peran Intern	51
2. Peran Ekstern	52
B. Kerangka Berfikir PKS Kaitannya dengan Moralitas Politik Islam	58
 BAB V : PENUTUP	 64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65
C. Penutup.....	66

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Faris
Tempat/ tanggal lahir : Rembang, 6 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Lodan Wetan Rt. 01 Rw. 02 Kec. Sarang Kab. Rembang
Pendidikan :
➤ SD Negeri Lodan Wetan I lulus tahun 1996
➤ MTs. Riyadlotut Tholabah Sedan lulus tahun 1999
➤ MAN Lasem lulus tahun 2002
➤ IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah lulus tahun 2007

Pengalaman Organisasi :

- Ketua Keluarga Mahasiswa Rembang di Semarang (KAMARESA) periode 2002-2003.
- Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Korkom Walisong Semarang periode 2005-2006.
- Menteri Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Siyasa Jinayah periode 2006-2007.
- Anggota Badan Pengawas Koperasi Mahasiswa Walisongo IAIN Walisongo Semarang periode 2006-2007.

Demikian daftar riwayat hidup penulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 16 Januari 2007

Hormat Saya

M. Faris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan masyarakat Indonesia partai politik memiliki stigma negatif. Partai politik lebih identik dengan sebuah institusi dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan melakukan berbagai cara. Padahal dalam UU No. 31/2002 tentang partai politik, dijelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Dalam undang-undang tersebut nampak jelas bahwa visi dari partai politik yaitu "memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara". Tetapi pada kenyataannya sekarang ini partai politik baru bisa melaksanakan visi yang pertama "memperjuangkan kepentingan anggota" dengan berbagai upaya dan cara untuk memperjuangkannya.

Keberadaan partai politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi memang mutlak diperlukan. Dalam tataran idealitas, partai politik diharapkan mampu mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap bangsa dan negara. Keberadaan partai politik menurut Samuel P. Huntington merupakan wujud dari perilaku masyarakat modern, sedangkan masyarakat tradisional pada

umumnya tidak memerlukan bahkan tidak mengenal adanya partai politik,¹ sedangkan kelompok penguasa cenderung menganggap partai sebagai kekuatan pemecah belah dan mengancam otoritas mereka.

Keberadaan partai juga dapat melengkapi berbagai rangsangan untuk melakukan tindak korupsi, namun dorongan untuk membangun partai yang berwibawa akan menggantikan segala bentuk kepentingan pribadi yang bersifat sektoral menjadi kepentingan umum yang melembaga.² Dengan terakomodirnya kepentingan umum dan kehidupan dengan saling menolong, tangan yang di atas membantu yang di bawah, yang kuat membantu yang lemah, pemimpin membimbing bawahannya, serta rakyat mendapat jaminan akan hak-haknya. Walhasil, dalam kehidupan bermasyarakat, praktek saling bantu sesama manusia dapat terwujud, untuk secara bersama menuju kehidupan sejahtera yang menjadi idaman bagi setiap bangsa. Hanya saja, sering dalam kenyataan, muncul praktek-praktek moral yang tidak terpuji, yang menjadikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak sebagaimana yang diharapkan. Ada praktek perebutan kekuasaan, penindasan terhadap rakyat, pemusnahan hak-hak kewarganegaraan, persaingan antar pemimpin, konflik horizontal dan lain sebagainya, yang menjadikan institusi sosial berubah menjadi “arena pertarungan sengit”.³

¹ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*. Terj. Sahat Simanora dan Suryatim “Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 478.

² *Ibid.*, hlm. 481.

³ Utsman Abdul Mu’is Ruslan, *Al-Tarbiyah As-Siyasiyah ‘Inda Jama’ah Al-Ikhwān Al-Muslimin*. Terj. Salafuddin Abu Sayyid, et al., “Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin”, Solo : Era Intermedia, 2000, hlm. Viii.

Sementara itu rakyat yang menjadi korbannya, hanya karena segelintir para penguasa dengan *vested interes*-nya untuk tetap berkuasa dan tidak menanamkan kebajikan dan kendaraan yang mengantarkan umat manusia menuju kehidupan ideal yang dicita-citakan. Karena fenomena yang demikian maka praktek kebijakan para penguasa terhadap warga negaranya sering menjadi sorotan dan pembahasan yang tidak ada habis-habisnya.

Banyak tinjauan dari luar (yang hendaknya kita tolak begitu saja secara *xenofobis*) mengatakan bahwa negara kita adalah negara yang secara etis dan moral sosial politik dan ekonomi termasuk lunak.⁴ Dalam konteks inilah agaknya pembicaraan tentang etika politik menjadi relevan. Pentingnya pembahasan mengenai etika politik setidaknya karena tiga alasan. *Pertama*, betapapun kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya tetap membutuhkan legitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai, hukum atau peraturan perundangan. Di sinilah letak celah di mana etika politik dapat berbicara dengan otoritas. *Kedua*, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan menoleransi politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik. *Ketiga*, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran tentang perlunya penyelesaian yang mendesak dan

⁴ Nurcholis Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Revormasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. xxxx.

adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu pada etika politik. Pernyataan "perubahan harus konstitusional" menunjukkan bahwa etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.⁵

Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Definisi etika politik ini membantu menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Dalam perspektif ini, pengertian etika politik mengandung tiga tuntutan: (1) upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain; (2) upaya memperluas lingkup kebebasan; dan (3) membangun institusi-institusi yang adil.⁶ Tiga tuntutan tersebut saling terkait. "Hidup bersama dan untuk orang lain" tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan yang mencegah warga negara atau kelompok-kelompok dari perbuatan yang saling merugikan. Kebebasan warga negara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan yang terakhir ini dimaksudkan sebagai syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan konkret kebebasan (*democratic liberties*) yang meliputi kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

⁵ Ruslani, "Ingatan Sosial dan Etika Politik", dalam *Kompas*, Edisi Rabu 01 Juni 2005.

⁶ *Ibid.*

Kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kancah perpolitikan di Indonesia patut dipertimbangkan. Visi/usaha yang dimiliki oleh PKS yaitu membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman, membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami, mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang, membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa (AD Pasal 6). Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tegaknya 'Masyarakat Islami' yang memiliki kemandirian berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia (ART Pasal 3). Dalam mewujudkan visi/misi yang ada dalam AD/ART partai, banyak komentar bahwa kader PKS dapat dikatakan cukup komit. Mereka mematuhi aturan-aturan yang sebelumnya telah disepakati bersama dan santun dalam berpolitik.

Semua kebijakan dan perilaku kader-kader PKS dalam menyikapi persoalan yang mereka hadapi tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Dewan Syari'ah partai. Sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera yang menerangkan bahwa Dewan Syari'ah yang notabennya sebagai lembaga fatwa dan qadha yang bertugas merumuskan landasan Syar'i terhadap partai dalam menjalankan aktifitasnya serta memberikan jawaban Syar'i terhadap berbagai permasalahan yang sedang dihadapi partai dan anggotanya serta masyarakat luas. (AD Pasal 17).

Dari sisilah penulis mempunyai asumsi bahwa konstruksi yang dimiliki PKS saat ini mempunyai kaitan yang erat terhadap penerapan etika dalam berpolitik. Sehingga diharapkan semua kader-kader PKS baik yang berada di parlemen atau organisasi dapat bersikap santun dalam berpolitik yang tentunya dengan berpegangan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan partai. Untuk itulah penulis ingin menggali lebih dalam mengenai peran Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera dalam penerapan etika berpolitik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kaji, oleh karena itu agar tidak terjadi perluasan permasalahan, maka penulis membatasi pada pokok permasalahan yang nantinya akan dikaji sebagaimana dibawah ini;

1. Bagaimana peran Dewan Syari'ah PKS dalam penerapan etika berpolitik?
2. Bagaimana kerangka berfikir PKS kaitannya dengan moralitas politik Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah penulis memaparkan beberapa permasalahan diatas penulis mempunyai tujuan :

1. Tujuan Formal

Untuk memenuhi kewajiban akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S. I) pada fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Mengetahui fungsi dan peran Dewan Syari'ah yang ada di Partai Keadilan Sejahtera serta pengaruhnya dalam penerapan etika berpolitik.
- b. Mengetahi kerangka berfikir PKS kaitannya dengan moralitas politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai penerapan etika dalam berpolitik saat ini memang sangat menarik untuk dikaji khususnya di Indonesia. Penulis sengaja menyinggung mengenai penerapan etika dalam berpolitik yang ada dalam Partai Keadilan Sejahtera. Penulis rasa permasalahan yang penulis angkat ini unik, hal ini dikarenakan sejauh ini kader-kader yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera dianggap komit terhadap aturan dan santun dalam berpolitik.

Namun tidak menutup kemungkinan banyak peneliti lain yang telah membahas mengenai etika dalam berpolitik. Misalnya Dennis F. Thompson memaparkan kecongkakan/kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam rangka memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam karyanya ini Thompson lebih menitik beratkan pada penilaian etis atas tindakan politik yang dilakukan oleh pejabat negara.⁷

⁷ Dennis F. Thompson, *Political Ethics and Public Office*, Terj. Benyamin Molan, "Etika Politik Pejabat Negara", Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* yang membahas mengenai perilaku manusia, terutama birokrat dengan nilai-nilai filosofis. Dalam bab II Wahyudi membahas tentang etika sosial sebagai landasan konsepsi etika administrasi. Dalam karyanya ini Wahyudi menitik beratkan pada penanaman etika dikalangan birokrat sehingga tercipta iklim politik yang mapan.⁸

Ahwan Fanai, dalam penelitian individualnya yang diajukan ke Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang dengan judul *Sikap Aktivis Partai Keadilan Sejahtera Semarang Terhadap Kebangsaan, Demokrasi dan Budaya Lokal*. Dalam karyanya tersebut Ahwan mengulas tentang nasab pemikiran dan idiologi Partai Keadilan Sejahtera. Namun yang menjadi *stressing* pembahasannya adalah bagaimana sikap kader dan aktivis Partai Keadilan Sejahtera terhadap kebangsaan, demokrasi dan budaya lokal.⁹

Ahmad Fadholi (2101301) dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Kepemimpinan dalam Partai Keadilan Sejahtera (Studi Tentang Penentuan Kriteria Presiden menurut Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu 2004)*, dalam karyanya tersebut Fadholi memaparkan konsep dan pemikiran Partai Keadilah Sejahtera mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebagai

⁸ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. viii.

⁹ Ahwan Fanani, "Sikap Aktivis Partai Keadilan Sejahtera Semarang Terhadap Kebangsaan, Demokrasi dan Budaya Lokal", Semarang : Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2006, t.d.

sosok Presiden serta kerangka berfikir Partai Keadilan Sejahtera dalam upaya demokratisasi pemilu 2004.¹⁰

Ali Said Damanik dalam buku *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Dalam karyanya tersebut Damanik berusaha mendeskripsikan mengenai alur sejarah gerakan Tarbiyah yang *survive* dan menjelma dalam sebuah partai (Partai Keadilan). Gerakan Tarbiyah di Indonesia yang mulanya memiliki ruang gerak yang terbatas, namun dengan segala perjuangan dan komitmen dan keyakinan kader-kadernya mampu membawanya ke gerakan struktural. Gerakan yang diprakarsai oleh anak-anak ITB ini menjadikan "Islam Kaffah" spirit perjuangannya. Yaitu Islam yang bersifat universal dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, Islam yang tidak hanya mengatur masalah ibadah saja. Bahan dalam perkembangannya gerakan Tarbiyah yang bermula dari Masjid "Salman" ini mampu mendirikan sebuah lembaga keuangan yang mengadopsi prinsip dan asas-asas Islam. Selain itu Damanik juga menerangkan secara detail bagaimana proses perubahan gerakan Tarbiyah yang semula gerakan kultural menjadi gerakan struktural. Pendirian partai politik (Partai Keadilan Sejahtera) oleh kader-kader gerakan Tarbiyah/Dakwah merupakan wujud transformasi gerakan untuk menembus struktur pemerintahan.¹¹

Aay Muhammad Furkon, juga melakukan penelitian yang menjadikan PKS sebagai subyek penelitian, namun dalam karyanya tersebut Furkon

¹⁰ Ahmad Fadholi, "Kepemimpinan dalam Partai Keadilan Sejahtera (Studi Tentang Penentuan Kriteria Presiden menurut Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu 2004)", Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.t.d

¹¹ Ali Said Damanik "*Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta : Teraju, 2003, Cet. II, hlm. viii.

mengkaji secara detail mengenai pemikiran al-Ikhwanul Muslimin yang diwakili oleh Hasan al-Banna serta proses transmisi dan pengaruh pemikirannya terhadap Partai Keadilan.¹²

Penulis sengaja memaparkan karya dari para tokoh-tokoh yang ada relevansinya terhadap penelitian yang nantinya akan penulis kaji. Hal ini sengaja penulis lakukan untuk menghindari pengulangan atau plagiarisma terhadap karya yang terdahulu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian literal (*library research*). Untuk itu data-data penelitiannya sebagian besar bersumber dari dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,¹³ namun bukan berarti penelitian ini mengenyampingkan data-data yang penulis ambil dari lapangan. Adapun sumber-sumber data yang akan digunakan adalah: 1) Himpunan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. 2) Program Kerja Dewan Syari'ah periode (2005-2010) Buku-buku atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan etika dan politik, serta karya-karya lain yang dapat mendukung penelitian ini sebagai sumber sekunder. 3) Wawancara dengan beberapa kader atau pengurus PKS dan anggota Dewan Syari'ah.

¹² Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera; Idiologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Teraju, 2004, hlm. 279.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Researc Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 32.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dipergunakan beberapa metode, yakni :

- a. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti keputusan, arsip, karya ilmiah yang diterbitkan untuk umum maupun untuk kalangan tertentu.
- b. Wawancara (*interview*), yang dilakukan dengan anggota Dewan Syari'ah dan kader. Wawancara ini dimaksudkan guna menggali pemahaman etika serta urgensinya dalam berpolitik yang berfungsi sebagai pendukung metode-metode sebelumnya.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Secara umum tujuan penulisan deskriptif analitis ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diteliti,¹⁴ di mana dalam penelitian ini yang dilakukan adalah mendeskripsikan fungsi dan peran dewan Syar'ah serta relevansinya dalam penerapan etika berpolitik. Kemudian penulis menginterpretasikannya berdasarkan fakta-fakta telah dikumpulkan.¹⁵

¹⁴ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, cet. II, 1996, hlm. 73.

¹⁵ *Ibid.*

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penelitian ini lebih mengarah, maka penelitian ini penulis sistematisir menjadi lima bab, dimana penyusunan antara satu bab dengan bab yang lain berusaha disajikan secara sistematis dan logis sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah apa saja yang menjadi fokus penelitian, manfaat dan tujuan penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan laporan hasil penelitian.

BAB II Membahas tentang pengertian dan ruang lingkup etika, dimensi etika politik serta agama sebagai dasar etika.

BAB III. Memaparkan tentang profil Dewan Syari'ah, kedudukan, tugas dan wewenang Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera, dan beberapa fatwa-fatwa atau keputusan Dewan Syari'ah PKS yang berkenaan dengan penerapan etika berpolitik.

BAB IV Memuat analisa mengenai peran Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera sebagai lembaga fatwa kaitannya dengan penerapan etika berpolitik serta kerangka berfikir PKS kaitannya dengan moralitas politik Islam.

BAB V Penutup, yang akan berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, baik kondisi, kualitas masalah serta saran-saran yang memungkinkan dapat membantu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi dan penutup.

BAB II

ISLAM DAN ETIKA POLITIK

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Etika

Dalam pandangan filsafat Yunani, pokok penelitian etika adalah segala hal yang tercakup dalam gagasan tentang apa sebenarnya yang baik atau dikehendaki oleh manusia, yakni segala hal yang secara sadar dipilih atau dilakukan oleh manusia. Untuk menjelaskan pengertian etika, akan dimulai dengan pandangan etika berdasarkan etimologi.

Kalau melihat akar katanya, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu, *Ethos* yang artinya kebiasaan dalam tingkah laku manusia.¹ Franz Magnis Suseno menganggap etika sebagai usaha pemikiran sistematis tentang moralitas.² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).³ Tetapi dalam perkembangannya studi ini tidak hanya membahas kebiasaan yang semata-mata berdasarkan tata cara (*manners*), melainkan membahas kebiasaan (*Custom*) yang berdasarkan pada sesuatu yang melekat dalam kodrat manusia (*inherent in human nature*)

¹ A.M. Hoeta Soehoet, *Etika dan Kode Etik Komunikasi*, Jakarta : Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, 2002, hlm. 2.

² Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Cet. I, Yogyakarta : Kanisius, 1987, hlm. 13.

³ Hari Murti Kridalaksana, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. II, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, hlm. 271.

yaitu suatu kebiasaan yang terikat pada pengertian baik atau buruk dalam tingkah laku manusia.⁴

Masih dalam pembahasan yang sama, Robert Cavalier membuat penilaian yang baik antara adat istiadat dan moral. Dia berpendapat ada perbedaan antara moral (*morals*) dan kebiasaan (*mores*). *Morals* merupakan perlakuan terhadap orang lain, sedangkan *mores* merupakan adat istiadat yang tidak merugikan orang lain atau lebih bersifat interaktif.⁵

Etika juga berbeda dengan etiket, walaupun keduanya menyangkut perilaku serta mengatur perilaku manusia secara normatif (memberi norma pada perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan manusia). Perbedaannya adalah etiket menyangkut ‘cara’ suatu perbuatan harus dilakukan manusia (cara yang tepat) artinya, cara yang diharapkan serta ditentukan dalam kalangan tertentu. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara melakukan suatu perbuatan, etika memberi norma pada perbuatan itu sendiri, apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak.

Dalam kajian etika, manusia merupakan obyek kajian yaitu sebagai obyek materia. Sedangkan obyek formanya adalah baik dan buruknya tingkah laku manusia. Namun tidak semua tingkah laku manusia menjadi kajian etika, Hoeta Soehoet memberikan batasan bahwa tindakan yang menjadi kajian etika adalah tindakan yang dilakukan dengan sadar atas pilihan (*volunteer*).

⁴ Agus Makmurtono dan Munawir, *Etika (Filsafat Moral)*, Cet. 1, Jakarta: Wira Sari, 1989, hlm. 10.

⁵ Mohammad A. Somali, *Relativisme Etika; Menyisir Perdebatan Hangat dan Memetik Wawasan Baru Tentang Dasar-dasar Moralitas*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005, hlm. 275. Atau lihat Robert Cavalier, *Section 6: Ethical Relativism*, Carnegie Mellon University, 1996.

Sedangkan tingkah laku yang didasari tanpa adanya aspek “kesengajaan” tidak termasuk ruang lingkup kajian etika.⁶

Mengacu pada pendapat Franz Magnis Suseno mengenai etika yang berfungsi sebagai usaha pemikiran sistematis tentang moralitas, lebih jauh dia menjelaskan bahwa “moral” selalu menunjuk pada manusia sebagai manusia. Dengan kata lain moral adalah sebuah norma yang berfungsi sebagai tolok ukur betul-salahnya tindakan manusia sebagai manusia.⁷ Memang, Etika berbeda dengan ajaran moral. Ajaran moral langsung mengajarkan bagaimana orang harus hidup, berupa rumusan sistematis terhadap anggapan-anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban-kewajiban manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang nilai-nilai ajaran moral. Etika dalam pengertian yang sebenarnya berarti filsafat mengenai bidang moral, jadi etika merupakan ilmu bukan sebuah ajaran yaitu refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, dan istilah-istilah moral.

Seiring dengan berkembangnya nuansa keilmuan, etika mampu memasuki ranah ilmu-ilmu atau disiplin ilmu yang lain. Seperti etika bisnis, etika jurnalis, termasuk etika politik.

B. Dimensi Etika Politik

Yang dimaksud dengan etika berpolitik adalah menerapkan aturan-aturan umum mengenai etika pada perilaku politik. Pada dasarnya peran etika dalam politik adalah ia mampu menjamin harkat dan martabat manusia

⁶ A.M. Hoeta Soehoet, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987, hlm. 14.

termasuk hak-hak yang secara wajar harus dimilikinya serta terciptanya legitimasi politik yang bertanggung jawab. Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Definisi etika politik ini membantu menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada.

Dalam perspektif ini, pengertian etika politik mengandung tiga tuntutan: (1) upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain; (2) upaya memperluas lingkup kebebasan; dan (3) membangun institusi-institusi yang adil. Tuntutan tersebut mencerminkan betapa semakin sulitnya hubungan antara etika dan perilaku politik. Perilaku politik yang diwakili oleh partai politik kebanyakan bertendensi pada kepentingan dan kekuasaan belaka, dan ini sangat bertentangan dengan hukum. Dalam undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang partai politik, dijelaskan partai politik mempunyai tugas untuk :

1. Melakukan pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Menciptakan iklim yang kondusif dan program konkrit serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara.

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.⁸

Dalam tinjauan historis, studi ini lahir di Yunani, tepatnya pada saat struktur-struktur politik tradisional mulai ambruk. Dengan keterpurukan itulah muncul pertanyaan bagaimana seharusnya masyarakat ditata. Tugas etika politik adalah membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Memang, etika politik tidak dapat *mengkhotbahi* para politikus, tetapi dapat memberikan rambu-rambu normatif untuk menjadi pegangan dalam kehidupan berpolitik.⁹

Dalam dunia modern etika politik muncul kembali dengan kuat sebagai akibat dari perluasan jangkauan kekuasaan manusia yang juga memperluas jangkauan masalah yang harus diputuskannya. Agar keputusan-keputusan yang kompleks itu diambil dengan memperhatikan segi-segi yang tidak boleh dikorbankan, diperlukan prinsip-prinsip etis penataan masyarakat. Dalam konteks inilah pembicaraan tentang etika politik menjadi relevan.

Etika politik tidak hanya masalah perilaku politikus. Tetapi ia juga berhubungan dengan praktek institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik dan ekonomi. Setidaknya etika politik memiliki tiga dimensi yaitu tujuan, sarana dan aksi politik. Kadang kita sulit memetakan antara etika individual dan etika sosial. Di satu pihak, etika politik sekaligus adalah etika individual karena membahas kualitas moral pelaku; dikatakan

⁸ Undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, Pasal 7.

⁹ Franz Magnis Suseno, *Op.Cit.*, hlm. 3.

etika sosial karena etika merefleksikan hukum, tatanan sosial dan institusi yang adil.¹⁰

Kaitannya dengan etika berpolitik, peranan agama dalam merumuskan konsep etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja, Hasan al-Banna menganalogkan Islam dan politik itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Oleh karena itu sia-sia orang yang akan memisahkannya, sebab Islam memiliki politik yang bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹

C. Agama Sebagai Dasar Etika

Kontribusi agama terhadap kemajuan peradaban dan kemanusiaan sepertinya tidak diragukan lagi. Sebagai wujud kongkrit, kita bisa melihat benih-benih lahirnya hak asasi manusia (HAM) justru dikarenakan karena *resistensi* agama, begitu juga sebaliknya agama juga dapat menjadi pemicu konflik yang dahsyat. Namun kehadiran agama sendiri diyakini sebagai nalar pembebasan dari sebuah kediktatoran idiologi dan pengagungan *truth* yang tidak pernah terbukti.

Agama juga dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua, di satu sisi agama merupakan tempat orang menemukan kedamaian hati, kedalaman hidup dan harapan yang kukuh. Dengan agama seseorang sering mendapatkan kekuatan untuk menghadapi problematika yang ada. Di sisi lain agama

¹⁰ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2003, hlm. 25.

¹¹ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera; Idiologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Teraju, 2004, hlm. 59.

dianggap sebagai pemicu konflik dan kekerasan, padahal dalam pembelaan agama mereka sering mengatakan bahwa agama mengajarkan perdamaian, cinta kasih dan menentang adanya kekerasan terhadap sesama. Namun semua itu sering diabaikan bahkan menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dan tak jarang mengakibatkan konflik kekerasan yang berkepanjangan.¹²

Dari fenomena itulah yang kemudian dianggap dapat menghambat proses *global democratic* dan kelangsungan hidup manusia yang damai, aman dan bahagia. Sehingga, sebagaimana pandangan Hans Kung (seorang teolog asal Jerman) perlu adanya perdamaian dan persahabatan agama-agama di dunia yang terangkum dalam etika global yang dapat dijadikan barometer dan kontrol perilaku manusia.

1. Kelahiran Etika Global (*A Global Ethic*)

Deklarasi Parlemen Agama-agama Sedunia (*Parliament of the World's Religions*) yang berlangsung di Chicago Amerika Serikat pada tahun 1993 yang sering disebut "Deklarasi Chicago" dapat dijadikan icon lahirnya Etika Global.¹³ Dengan adanya Etika Global diharapkan mampu memberi sumbangan dan jawaban agama-agama terhadap problema kehidupan umat manusia pada era globalisasi.

Pembentukan Parlemen agama-agama sedunia sebetulnya bukan kali pertama dilakukan, pada tahun 1893 parlemen ini pertama kali dibentuk di Chicago Amerika Serikat dan melahirkan gagasan yang

¹² Haryatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹³ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2002, hlm. 207.

terkenal dengan "Teologi Universal" yang dimaksudkan untuk mengakui adanya pluralisme keagamaan dan adanya titik temu pandangan agama-agama mengenai eksistensi sebuah agama dan bukan untuk menyatukan keyakinan yang telah dibentuk oleh masing-masing agama. Sedangkan disini Etika Global merupakan kerangka praktis yang berupa paradigma etik dan moral untuk dilaksanakan dalam kehidupan.¹⁴

Asumsi yang mendasari adanya deklarasi Etika Global adalah melihat kondisi dunia yang sedang mengalami krisis ekonomi, ekologi, dan politik yang mengglobal. Dari krisis global tersebut melahirkan berbagai bencana yang mengancam umat manusia yang juga mengglobal, seperti kelaparan, kemiskinan, pengangguran, kekerasan, penindasan dan pembunuhan. Dan mereka menganggap bahwa penyebab dari berbagai krisis adalah krisis kemanusiaan (krisis etika). Sebagai sebuah gambaran jika penguasa politik dan ekonom tidak memiliki wawasan yang tidak memadai tentang etika, maka mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan tanpa melihat dampak bagi orang lain (menyebabkan kerugian). Kemunculan Etika Global juga tidak dimaksudkan sebagai satu idiologi global atau sebagai agama tunggal, tetapi Etika Global dimaksudkan sebagai suatu permufakatan mendasar tentang nilai-nilai mengikat, ukuran-ukuran pasti dan sikap-sikap pribadi yang harus dimiliki oleh individu.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 208.

Dalam perspektif "Deklarasi Chicago" problematika yang dihadapi bangsa-bangsa di dunia dewasa ini adalah krisis etika, yakni rendahnya kadar apresiasi terhadap etika peradaban yang bersumber dari agama. Tawaran agama untuk menjadikan Tuhan sebagai dzat yang "Maha" segala-galanya akan meruntuhkan kesombongan dan egoisme baik yang dilakukan secara individual maupun yang bersifat kelompok, seperti dalam bentuk rasisme dan fanatisme.

Dalam hal ini agama tetap memiliki posisi strategis dalam menciptakan konstruksi sejarah peradaban manusia dan agama juga telah mempengaruhi perjalanan peradaban manusia secara intens. Dengan segala konsekuensi dari segala partisipasi semacam itu, agama telah mempertaruhkan banyak hal dari keberadaannya sebagai sebuah institusi sosial. Nilai-nilai religius dan etika yang terkandung dalam agama turut memperkuat posisi strategis agama dalam kancah dan percaturan kehidupan modern. Agama tidak semata sesuatu yang '*transenden*', jauh dari pelukan manusia.

Agama selalu bersentuhan dengan berbagai persoalan kemanusiaan. Maka, agama secara faktual harus mencerminkan keberpihakannya pada kemanusiaan itu sendiri. Agama tidak dapat mengecualikan diri terhadap pemecahan problematika sejarah yang terus mengurung kemanusiaan. Pasalnya, ada implikasi terhadap tanggung jawab agama dalam sejarah. Hal ini mengandaikan sebuah keberanian dalam menerobos pembatasan-pembatasan dogmatik yang sering kali

membuat agama-agama statis dalam mengutamakan aksi pembebasan kemanusiaan.¹⁵

Lebih jauh Din Syamsudin menekankan bahwa dengan adanya Etika Global maka perlu dikembangkannya komitmen baru yang berwajah lebih manusiawi, diantara komitmen-komitmen tersebut adalah *Pertama*, komitmen terhadap budaya tanpa kekerasan dan penghormatan terhadap hidup. *Kedua*, komitmen kepada budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil. *Ketiga*, komitmen kepada budaya toleransi dan kejujuran. *Keempat*, komitmen kepada budaya persamaan dan kemitraan antara kaum wanita dan laki-laki.¹⁶

2. Islam Sebagai Sumber Etika

Agama merupakan landasan pembangunan disegala lini yang melingkupi pembangunan negara maupun kerajaan, sebab agama dapat mempersatukan individu tanpa melihat ras, keturunan dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana agama-agama sebelumnya, kelahiran Islam di dunia adalah untuk menata ulang *sosio culture* umat manusia dan menjadikan Makkah sebagai laboratorium pertama untuk sebuah kesuksesan dalam perubahan kebudayaan. Sebagaimana visi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. yaitu untuk menata tatanan sosial masyarakat Jahiliyah menjadi masyarakat madani yang dicita-citakan dan berperadaban berdasarkan firman Tuhan. Dikatakan juga bahwa akhlak

¹⁵ Max Regus, "Agama dan Era Sinisme Sosial", dalam *Suara Pembaruan*, Rabu 3 Agustus 2005.

¹⁶ M. Din Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 210.

yang melekat dalam kepribadian Nabi Muhammad adalah al-Qur'an.¹⁷ Ini berarti bahwa segala sifat Nabi termasuk kebijaksanaannya merupakan inspirasi yang datang langsung dari Tuhan.

Kalau kita melihat gambaran masyarakat Jahiliyah pada masa awal perkembangan Islam, dimana egoisme kesukuan, penuh ambisi dan kasar, yang telah mendarah daging dan kerab menjadi pemicu kekerasan hampir tidak memungkinkan untuk dirubah. Namun dengan semangat perdamaian dan segala kebijakan yang dibawa oleh agama (Islam) mampu merubah watak dan sikap masyarakat Makkah (Jahiliyah) menjadi masyarakat yang cinta damai, toleran dan penuh kebersamaan. Hal ini digambarkan pula oleh Ibnu Khadun dalam karyanya *Muqaddimah*;

“.....warna keagamaan benar-benar menjauhkan rasa saling cemburu dan iri hati diantara bangsa yang mempunyai rasa kelompok yang sama, dan menyebabkan mereka menyatu dalam kebenaran. Di satu pihak, bila sekelompok orang yang memiliki satu warna keagamaan dapat mencapai satu pendapat yang benar dalam menghadapi segala persoalan, tak seorang pun dapat menahan mereka. Sebab sudut pandang mereka satu dan tujuan mereka pun merupakan kesepakatan bersama. Mereka rela mati untuk tujuan-tujuannya.”¹⁸

Dari kutipan di atas, menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun menempatkan agama sebagai daya pemersatu dan sumber kekuatan politik. Agama merupakan landasan pembangunan negara dan kerajaan, sebab agama dapat mempersatukan dan menjamin moralitas kelompok.

Walaupun dimungkinkan tanpa agama sebuah kelompok dapat

¹⁷ Al-Ghazali, *Ihya al-Ulum al-Din*, Bairut : Dar al-Kutub al-Islam, juz. 2, tt., hlm. 352.

¹⁸ Asep Gunawan (ed.), *Artikulasi Islam Kutural dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 4.

mewujudkan kebersamaan dalam mencapai tujuan, namun jika agama dijadikan landasan oleh kelompok itu akan menjadi daya pemersatu yang lebih kuat dan bermoral.¹⁹

Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain ; menjadikan kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, perdamaian dan keselamatan, kesejahteraan masyarakat dan ketaatan rakyat.²⁰

a. Kekuasaan sebagai amanah

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang patut dijadikan pegangan oleh seorang pemimpin. Layaknya seorang pemimpin, ia adalah pemegang amanah anggota dan organisasi yang dipimpinnya.

Dasar yang dijadikan oleh prinsip ini adalah firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
النساء : ٥٨ ﴿﴾

¹⁹ Asep Gunawan (ed.), *Artikulasi Islam Kutural dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 5.

²⁰ Faisal Baasir, *Etika Politik; Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 144.

Artinya : “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum-hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’ : 58)²¹

Ayat ini turun berkenaan bahwa kaum muslimin tidak boleh mengikuti jejak orang-orang Yahudi, mereka tidak menunaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka yaitu untuk mengamalkan kitab suci yang telah diberikan kepada mereka serta tidak menyembunyikan isinya. Tuntutan diatas sangat ditekankan, karena ayat ini langsung menyebut nama Allah sebagai yang menuntun dan memerintahkan. Allah mewajibkan agar umat Islam menunaikan amanah secara sempurna dan tepat waktu, amanah itu dapat berwujud amanah dari Allah kepada umat-Nya maupun amanah yang diberikan oleh manusia untuk mereka sendiri.²²

Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan atau kepemimpinan, hal ini karena pada dasarnya kekuasaan atau kepemimpinan adalah bentuk pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari satu kelompok tertentu. Dengan hal inilah Islam melarang seorang pemimpin untuk berbuat sewenang-wenang (*abuse of power*) terhadap yang dipimpinnya. Kesewenang-wenangan itu

²¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Al-Waah, 1993, hlm. 128.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2005, cet. II, hlm. 480.

dapat berdampak langsung dan kasat mata atau secara tidak langsung (seperti kebijakan) yang memiliki kecenderungan bahaya laten.

b. Musyawarah

Prinsip musyawarah secara tegas dalam al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿الشورى : ٣٨﴾

Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.” (QS. As-Syura : 38)²³

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa mereka yang menyelesaikan persoalan dengan musyawarah adalah mereka yang termasuk orang-orang beriman. Prinsip ini merupakan tonggak dari asas demokrasi, dengan musyawarah potensi hegemoni dari pihak-pihak yang kuat menjadi *tereliminir*. Sebab dalam musyawarah dibuka partisipasi aktif bagi semua komponen masyarakat dalam posisi dan kedudukan yang sama. Musyawarah juga dapat diartikan sebagai forum tukar pendapat dalam rangka menemukan sebuah solusi atau kesepakatan mengenai persoalan yang sedang dihadapi.

Dalam proses musyawarah memerlukan kesiapan mental, karena dapat dipastikan bahwa akan terjadi perbedaan pendapat.

²³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 42.

Dalam tradisi Islam dikenal juga upaya pengambilan keputusan secara bersama-sama dan berdasarkan suara terbanyak, dalam upaya ini yang dipentingkan adalah adanya jiwa persaudaraan dan keputusan yang didasarkan pada nurani dan akal sehat secara bertanggung jawab terhadap suatu masalah yang menyangkut kemaslahatan bersama dan bukan didasarkan atas pertimbangan "kalah-menang".²⁴

c. Keadilan sosial

Dalam penerjemahannya adil tidak selalu berarti sama atau seimbang, namun lebih bersifat proporsional. Prinsip ini mutlak diperlukan dalam eksistensi sebuah negara. Banyak bukti sejarah dimana sebuah negara yang hancur akibat tidak adanya keadilan atau keadilannya dianggap sebagai sebuah ketidakadilan bagi warga negaranya. Jika hal itu sampai terjadi, maka dampak terburuk adalah tidak ada lagi kepercayaan masyarakat kepada negara.

Dalam Islam, Tuhan memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿المائدة : ٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil

²⁴ Faisal Baasir, *Op. Cit.*, hlm. 148.

itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah : 8)²⁵

Dari ayat diatas terdapat indikasi bahwa berbuat adil itu adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam berbagai tindakan, keputusan dan tingkah laku dalam tiap bidang kehidupan. Bahwa berlaku adil juga erat sekali kaitannya dengan menetapkan hukum dalam berbagai perkara kehidupan, khususnya bagi pejabat yang berwenang. Berlaku adil juga merupakan misi menegakkan kebenaran di jalan Allah.²⁶

Konsep keadilan sosial dalam konteks masyarakat Islam adalah proses pengambilan keputusan yang berdasarkan kebenaran karena Allah dan kebenarannya sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Keadilan tidak hanya sebatas keadilan dalam satu dimensi, namun merupakan konsep yang integral sebagai suatu sistem sosial. Ciri-ciri keadilan sosial disini melingkupi; berdasarkan pada hubungan persaudaraan yang Islami, membela kaum yang lemah, fakir dan miskin, mendasarkan pada perkembangan manusia yang dinamis, beretika memuliakan prestasi, berorientasi pada masa depan (jangka panjang).²⁷

d. Persamaan

Dalam Islam persamaan mempunyai cakupan yang sangat luas yang meliputi persamaan dibidang hukum, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Persamaan disini muncul atas dasar penciptaan manusia

²⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 159.

²⁶ Sri Edi Swasono, et.al., *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*; Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam, Jakarta : UI Press, 1987, hlm. 67.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

itu sendiri, bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan dan hanya mempunyai satu leluhur yaitu Adam. Karena itu Islam memandang tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang bukan Arab, antara orang kulit hitam dan orang yang berkulit putih. Perbedaan diantara mereka adalah tingkat ketaqwaan kepada Tuhan untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
﴿الحجرات: ١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat : 13)²⁸

e. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

Jauh sebelum PBB mendeklarasikan tentang deklarasi universal hak-hak asasi manusia (10 Desember 1948), Islam lebih dulu telah mengatur semua tentang hak-hak asasi manusia termasuk didalamnya mengenai hak untuk menganut sebuah idiologi atau sebuah keyakinan. Abul A’la al-Maududi lebih rinci menerangkan bahwa hak asasi manusia (muslim maupun non muslim) yang telah diatur oleh Islam meliputi : Keselamatan jiwa, pengakuan kepemilikan, penjagaan

²⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 847.

kehormatan seseorang, penjagaan kehidupan pribadi, Hak untuk menolak kezaliman, hak *amar ma'ruf wa-nahyu munkar*, kebebasan berkumpul (berorganisasi), kebebasan beragama, hak keamanan dari penindasan keagamaan, hak rakyat untuk memperoleh perlakuan yang sama oleh negara.²⁹

f. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak

Keadilan dalam Islam sangatlah dijunjung tinggi baik menyangkut umat Islam sendiri maupun non muslim. Al-Qur'an telah menerangkan tentang keharusan bersikap adil dan obyektif diantaranya; “.....hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.(al-Maidah : 8)³⁰

Melihat begitu pentingnya penegakan keadilan khususnya dalam lingkup peradilan dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam catatan sejarah, *ikhwal* pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menguasai Madinah adalah mengadakan perjanjian hukum dengan orang-orang Yahudi (non muslim), yang mana dengan adanya perjanjian tersebut diharapkan akan ada sebuah kesepakatan bersama mengenai aturan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perjanjian itu populer dengan istilah “Piagam Madinah”.

²⁹ Abul A'la al-Maududi, *Al-Khilafah wa al-Mulk*. Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung : Mizan, cet. VI, 1996, hlm.76.

³⁰ Depurtemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 159.

g. Perdamaian dan keselamatan

Islam merupakan agama yang cinta damai, Islam datang tidak dengan peperangan melainkan melalui dialog dengan *sosio-culture* masyarakat Arab jahiliyah untuk menata kembali tatanan sosial masyarakat yang cinta damai. Kalau ada rumor bahwa “Islam disebarkan dengan jalan kekerasan (peperangan)”, hal ini sama sekali tidak dibenarkan. Justru sebaliknya Islam melarang umatnya untuk melakukan tindak kekerasan (peperangan) kecuali apabila ada pihak lain yang memulainya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿البقرة : ١٩٠﴾

Artinya : “Dan perangilah di jalan-jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah engkau melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memulai batas” (QS. Al-Baqarah : 190)³¹

h. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan merupakan implementasi dari rasa aman, sontosa, makmur, tidak ada lagi berbagai macam gangguan atau kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Kesejahteraan masyarakat lebih identik dengan pemenuhan segala kebutuhan yang mencakup sandang, pangan dan papan. Islam memandang kesejahteraan tidak hanya sekedar kesejahteraan lahir saja, namun juga meliputi

³¹ *Ibid.*, hlm. 46.

kesejahteraan batin. Dalam hal ini negara wajib menjamin akan kebutuhan tersebut.

Agama Islam yang notabennya tidak hanya mementingkan aspek spiritualitas, maka dalam konsep kesejahteraan juga diimbangi dengan peran sosial kemasyarakatan sebagai *basic* dalam mewujudkan kesejahteraan. Salah satu contoh sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an bahwa “....orang yang menelantarkan anak-anak yatim dan tidak menyuruh (manusia) memberi makan orang miskin”³² orang seperti itu dikatakan orang-orang telah mendustakan agama. Dan “...orang-orang yang riya dan enggan memberikan pertolongan”³³ mereka dikatakan sebagai orang yang telah melalaikan shalat.

Tidak hanya itu, adanya perintah untuk menunaikan zakat, bersedekah, dan wakaf semata-mata hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Islam juga mewajibkan umatnya agar tidak hanya pasif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, namun umat Islam senantiasa harus aktif dengan menjadikan ajaran Islam sebagai etos kerja.

i. Ketaatan rakyat

Dasar Qur'ani yang dijadikan prinsip ini adalah firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿النِّسَاءُ : ٥٩﴾

³² QS. Al-Ma'un : 2-3.

³³ QS. Al-Ma'un : 6-7.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Maka jika kamu tarik menarik pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir yang demikian itu baik dan lebih baik akibatnya.”
(QS. An-Nisa' : 59)³⁴

Ketaatan yang dimaksudkan dalam prinsip ini adalah bersifat *limitative*. Dalam hal ini ketaatan rakyat terhadap pemerintah dibatasi oleh sejauh mana orientasi pemerintah itu sendiri menuju pada kebenaran. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa apabila perintah kepada taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. baik yang diperintahkan-Nya secara langsung dalam al-Qur'an maupun yang dijelaskan melalui hadits-hadits Nabi. Perintah taat kepada Rasul disini menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah SWT., bukan yang beliau perintahkan secara langsung. Apabila perintah diulangi seperti yang terdapat dalam diatas, maka Rasul memiliki wewenang serta hak untuk ditaati. Itulah sebabnya perintah taat kepada *ulil amri* tidak disertai dengan kata "taatilah" karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT.³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 128.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, 483.

BAB III

PERAN DEWAN SYARI'AH PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

A. Profil Dewan Syari'ah PKS

Salah satu instrumen dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, bermartabat, bertanggung jawab, peduli, sejahtera dan bahagia serta terwujudnya pemerintah yang jujur dan bersih, transparan, berwibawa dan bertanggung jawab berdasarkan konstitusi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Dewan Syari'ah. Sepengetahuan penulis PKS adalah satu-satunya partai yang memiliki kelengkapan partai yang berfungsi sebagai lembaga fatwa dan qadhi, yaitu Dewan Syari'ah (DS). Ini adalah salah satu hal yang membuat PKS berbeda dengan partai Islam lainnya, karena keberadaan DS ini salah satunya untuk memberikan landasan syar'i bagi setiap tindakan PKS.

Dewan Syari'ah Pusat (DSP) PKS merupakan lembaga yang sejajar dengan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP). Keberadaan DSP dalam tubuh PKS sangat penting karena lembaga inilah yang mengontrol program yang dijalankan PKS apakah sesuai dengan syari'ah atau tidak. Selain ditingkat pusat Dewan Syari'ah juga terdapat ditingkatkan wilayah dan daerah.

Sedangkan mengenai Pengawasan, koordinasi, dan pertanggung jawaban Dewan Syari'ah adalah sebagai berikut :

1. Dewan Syari'ah Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, serta bertanggung jawab kepada Majelis Syura ;
2. Dewan Syari'ah Wilayah berada dibawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Syari'ah Pusat melalui Musyawarah Wilayah;
3. Dewan Syari'ah Daerah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Syari'ah Wilayah melalui Musyawarah Daerah.¹

Visi DSP PKS yang diusung pada kepengurusan tahun 2005-2010 dibawah pimpinan DR. Surahman Hidayat, MA “Menjadi lembaga yang bisa menjadi rujukan ummat”, untuk memuluskan visi tersebut, DSP mencanangkan misi memberikan *shibghor syari'ah* terhadap regulasi dan praktek mu'amalah di masyarakat. Sementara dalam koridor kepartaian misinya adalah memberikan *ta'shil syar'i* terhadap kebijakan partai dan mengawasi pelaksanaannya, memberikan jawab dan solusi syar'i terhadap berbagai masalah yang dihadapi partai dan anggotanya.² Untuk itu, dalam struktur organisasi Dewan Syari'ah yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris Dewan Syari'ah juga memiliki 6 Komisi (*Lajnah*), yaitu : *Lajnah Ifta'* (Fatwa), *Lajnah Qadha*, *Lajnah Tahqiq*, *Lajnah Buhuts*, *Lajnah Tadrib* dan *Lajnah Taqnin*.

¹ Anggaran Dasar PKS Bab IX Pasal 16.

² <http://www.PK-Sejahtera.org>

1. *Lajnah Ifta*, adalah komisi yang menyiapkan draft fatwa yang akan dikeluarkan.
2. *Lajnah Qadla*, adalah komisi yang melakukan proses peradilan terhadap pihak yang diajukan kepada Dewan Syari'ah Pusat.
3. *Lajnah Tahqiq*, adalah komisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk setiap perkara yang diajukan ke Dewan Syari'ah Pusat.
4. *Lajnah Buhuts*, adalah komisi yang melakukan kajian keilmuan sebagai bahan fatwa dan bayan syari'ah yang dikeluarkan Dewan Syari'ah Pusat.
5. *Lajnah Tadrib*, adalah komisi yang merancang dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personil Dewan Syari'ah.
6. *Lajnah Taqin*, adalah komisi yang melakukan telaah untuk kontribusi Partai pada aspek syar'i terhadap Rancangan Undang-undang atau regulasi lainnya.

Komisi inilah yang nantinya akan berperan aktif dalam mengawal kader-kader PKS agar tetap santun dan dalam koridor syari'at Islam. Selain itu Dewan Syari'ah juga mempunyai persyaratan tertentu untuk kader yang akan menempati pos-pos yang ada di Dewan Syari'ah. Diantaranya syarat-syarat tersebut adalah :³

Syarat Anggota Dewan Syari'ah Pusat :

1. Anggota Majelis Syura atau sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

³ Anggaran Rumah Tangga PKS pasal 25.

2. Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Syari'ah Pusat.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang peradilan dan mekanisme pengambilan keputusan syari'ah.
5. Bersifat amanah dan berwibawa.
6. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari'ah Pusat.

Syarat Ketua Dewan Syari'ah Wilayah adalah sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya Anggota Ahli.
2. Berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukum Islam.
4. Bersifat amanah dan berwibawa.

Syarat Ketua Dewan Syari'ah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
2. Berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum-hukum Islam.
4. Bersifat amanah dan berwibawa.

Persyaratan yang tegas tersebut dimaksudkan untuk menjaga kualitas kader Dewan Syari'ah. Adapun perbedaan pada syarat-syarat yang diberikan antara Dewan Syari'ah pusat, propinsi dan daerah sebagaimana diatas. Ini dikarenakan kapasitas tanggung jawab yang berbeda. Semakin tinggi posisinya maka tanggung jawabnya pun semakin berat, dan tentunya syarat-syarat yang ditentukan pun semakin ketat pula. Beberapa syarat diatas, menurut hemat penulis jika komitmen ini dilaksanakan maka kapabilitas dan dedikasi Dewan Syari'ah tidak diragukan lagi.

B. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah dalam Partai Keadilan Sejahtera

1. Kedudukan Dewan Syari'ah

Dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Syari'ah yang notabene-nya sebagai lembaga fatwa Partai, secara struktural anggota Dewan Syari'ah Pusat juga merupakan anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang diketuai oleh Ketua Majelis Syura. Adapun yang menjadi anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Ketua Dewan Syari'ah Pusat, Presiden Partai, Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera.⁴

Dewan Syari'ah terdiri atas Dewan Syari'ah Pusat, Dewan Syari'ah Wilayah, dan Dewan Syari'ah Daerah. Pada tingkat pusat adalah

⁴ Anggaran Dasar (AD) PKS Pasal 12 Poin 3.

Dewan Syari'ah Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat, pada tingkat propinsi adalah Dewan Syari'ah Wilayah yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Syari'ah Daerah yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Syari'ah

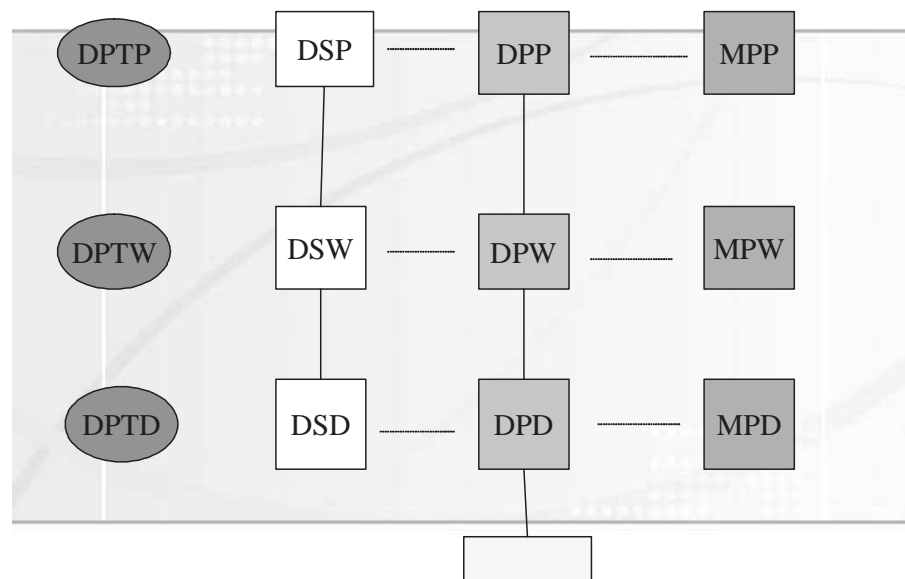
Dewan Syari'ah Pusat mempunyai tugas dan wewenang :

- a) Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional.
- b) Melaksanakan Putusan Majelis Syura.
- c) Melaksanakan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- d) Menyelenggarakan dan melaksanakan keputusan Rapat Kerja Nasional.
- e) Menetapkan fatwa.
- f) Mengadili dan menerima kasasi atas perkara-perkara syar'i di lingkungan Partai.
- g) Menetapkan landasan hukum dan syari'ah bagi Partai.
- h) Menerbitkan Panduan Dewan Syari'ah Pusat.
- i) Menerbitkan bayan.
- j) Menyelenggarakan sosialisasi peraturan tertentu.

Selain hal diatas, dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS pasal 26 dijelaskan bahwa Dewan Syari'ah bertugas :

- a) Melakukan pembinaan langsung terhadap Dewan Syari'ah di bawahnya.
- b) Melakukan kajian dan investigasi terhadap perkara-perkara yang tidak terselesaikan di Dewan Syari'ah di bawahnya.
- c) Melakukan investigasi terhadap isu, pengaduan, tuduhan, evaluasi, dan kesewenangan yang berkaitan dengan anggota Majelis Syura dan melaporkan hasilnya kepada Majelis Syura, serta
- d) Mengambil tindakan syar'i dalam masalah-masalah yang diserahkan oleh Majelis Syura, Dewan Pengurus Pusat, atau Dewan Syari'ah di bawahnya.

Berikut adalah struktur kelembagaan Dewan Syari'ah PKS :



C. Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera Kaitannya dengan Pembinaan Etika Berpolitik

Seiring dengan fenomena politik yang sering berkembang dan berubah, membuat kader PKS kesulitan dalam menentukan sikap, gejala politik yang kadang bertentangan dengan hati kecil mereka kerap memunculkan ambiguitas dan keragu-raguan. Dalam suasana seperti ini peran Dewan Syari'ah sangat dibutuhkan guna memberi sedikit pencerahan dan arahan dalam menyikapi fenomena dengan bijak dan sesuai dengan etika politik yang telah menjadi pegangan dalam kehidupan berpolitik mereka.

Diantara fatwa-fatwa Dewan syari'ah yang berkenaan dengan pembinaan moralitas politik diantaranya mengenai etika kampanye dalam Islam, Partisipasi Artis dan Tokoh dalam Kampanye, fatwa tentang golput, dan fatwa mengenai money politik.

1. Etika Kampanye dalam Islam

Dalam percaturan politik, kampanye merupakan upaya strategis untuk mencari dukungan dan menarik simpati massa agar mendukung kebijakan dan program-program partai. Dalam pandangan Dewan Syari'ah PKS, kampanye merupakan kegiatan propaganda partai dan program-programnya dalam rangka menarik dukungan dan simpati masyarakat. Di sisi lain Dewan Syari'ah mengkategorikan kampanye sebagai dakwah, baik dakwah kepada yang baik maupun dakwah yang buruk.⁵ Dasar qur'ani yang dapat dijadikan pegangan adalah firman Allah surat An-Nahl : 125.

⁵ H. Buchori Yusuf (ed.), *Fatwa Jihad Siyasi*, Jakarta : Mitra Grafika, 2004, hlm. 14.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
 ﴿النحل: ١٢٥﴾

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” (QS. An-Nahl : 125)⁶

Kaitannya dengan etika dalam kampanye, Dewan Syari'ah PKS memberikan rambu-rambu bagi kader-kadernya dalam berkampanye agar tidak keluar dari syari'at Islam, diantaranya :

- a. Ikhlas dan membebaskan diri dari motivasi rendah.
- b. Menampilkan partai dan menyampaikan program-programnya dengan cara yang sebaik-baiknya (*ihsan*).
- c. Tidak memaksa.
- d. Tidak jatuh pada dusta/bohong.
- e. Tidak mengucapkan janji secara berlebihan.
- f. Tidak jatuh dalam *ghibah*, caci maki dan cemooh.
- g. Tetap menjaga rasa *ukhuwah Islamiyah*.
- h. Tidak memuji-muji diri sendiri.
- i. Memberikan kemaslahatan bagi bangsa.
- j. Dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu pihak lain.
- k. Selalu ingat akan kewajiban utama.
- l. Memberi keteladanan yang baik.

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Al-Waah, 1993, hlm. 421.

Dari dua belas komitmen inilah PKS mampu menarik simpati masyarakat dan membersihkan citra kampanye yang selama ini terkesan rusuh dan membuat masyarakat tidak nyaman. Dari sisi pula PKS dikenal sebagai partai yang mampu mengerahkan massa dalam jumlah besar yang mencapai ribuan bahkan puluhan ribu dan dilaksanakan dengan tertib,⁷ hal ini dibuktikan dengan jumlah massa yang sebanyak itu dapat diatur dan dikendalikan, sehingga tidak merugikan kepentingan umum.⁸

2. Partisipasi Artis dan Tokoh dalam Kampanye

Keterlibatan artis dan tokoh pernah menjadi trend dalam kampanye parpol, ini lazim dilakukan karena pada dasarnya artis atau tokoh mempunyai fans dan simpatisan sendiri yang nantinya secara pasif akan memberikan dukungan bagi parpol yang diikuti oleh artis tersebut. Bahkan lebih jauh lagi artis mampu menjadi icon sebuah partai.

Fenomena ini sempat menjadi dilema dikalangan partai Islam seperti PKS, sehingga hal ini diatur khusus dalam bayan yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Pusat PKS. Dalam bayan dengan Nomor 02/B/K/Dewan Syari'ah-PKS/V/1424 mengenai partisipasi artis dan tokoh dalam kampanye memberi arahan rasional mengenai beberapa yang harus diperhatikan oleh partai ketika melibatkan artis atau tokoh dalam kampanye. Artis yang dimaksud oleh Dewan Syari'ah disini adalah orang-orang yang berprofesi memproduksi drama dalam film layar lebar, televisi, atau teater, baik sebagai produser, aktor, artis, sutradara dan lain-lain.

⁷ *Kompas*, Edisi 19 November 2006.

⁸ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Bandung : Mizan Media Utama, Cet. II., 2000, hlm. 270.

Sedangkan yang dimaksud tokoh adalah tokoh diluar bidang dakwah, seperti seorang politisi, pengusaha dan sebagainya.⁹ Pada dasarnya Dewan Syari'ah membolehkan artis dan tokoh dalam kampanye, karena dalam persepsi Dewan Syari'ah artis atau tokoh merupakan *wasilah* dalam berdakwah. Kebolehan ini pun diikuti dengan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh partai dalam mengikutsertakan artis atau tokoh dalam kampanye. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi :

- a. Citra artis atau tokoh bukan citra maksiat.
- b. Penampilannya sopan.
- c. Konteks keikutsertaannya tidak berupa sesuatu yang haram atau *syubhat*.
- d. Adanya keyakinan bahwa kita bisa mempengaruhi mereka, dan bukan sebaliknya.
- e. Keikutsertaannya tidak merusak partai.
- f. Adanya keyakinan bahwa keikutsertaannya memberikan manfaat.
- g. Tidak ada unsur *takalluf* (memaksa).
- h. Keikutsertaannya direncanakan secara dengan matang, dan tidak irtijali (spontan).
- i. Di *istisyarohkan* dulu ke DSW (Dewan Syari'ah Wilayah) atau DSP (Dewan Syari'ah Pusat)
- j. DSP tidak merekomendasikan partisipasi artis atau tokoh wanita.¹⁰

⁹ H. Buchori Yusuf (ed.), *Op.Cit.*, hlm. 43.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

3. Menyikapi Golput

Lazimnya negara yang menganut sistem demokrasi, pesta demokrasi atau pemilu harus diselenggarakan secara berkala untuk menentukan sosok yang akan menahkodai negara ke arah perubahan yang lebih baik. Disinilah letak urgensi peran masyarakat dalam menentukan negaranya sendiri dengan memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan yang dicita-citakan. Berdasarkan fakta lapangan, umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia, akan tetapi peran dan pengaruhnya dalam percaturan politik tidak terlalu signifikan, hal itu berdampak pada rusaknya moralitas para pemimpin, maraknya penyelewengan dalam penyelenggaraan negara dan merajalelanya kemungkaran dan kezaliman.

Untuk itulah masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menentukan perubahan dengan memberikan hak suara dalam pemilihan umum (pemilu). Dewan Syari'ah memberikan artikulasi pemilu sebagai ajang pertarungan antara hak dan batil. Untuk itu Dewan Syari'ah memandang bahwa keikutsertaan umat Islam dalam pemilu merupakan suatu keharusan dan hal yang sebaliknya (golput) dilarang. Hal ini didasarkan pada *kaidah ushuliyah* yang berbunyi :

الأمر بالشئ فمي عن ضده

“Perintah untuk mengerjakan sesuatu, berarti juga larangan untuk sebaliknya”

keharusan tersebut dalam pandangan Dewan Syari'ah harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :¹¹

- a. Memberikan hak suara adalah amanah, maka harus ekstra hati-hati dalam memilih, dengan menggunakan akal dan perasaan.
- b. Memberikan hak suara adalah kesaksian, maka harus diberikan kepada orang yang mempunyai komitmen kepada Islam, dengan memilih orang yang agamis dan nasionalis yang memiliki kelayakan dan kemampuan untuk mengemban amanat.
- c. Memberikan hak suara adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang sarat dengan masalah yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah.
- d. Tidak memberikan hak suara kepada orang yang ambisi dan atau meminta jabatan.
- e. Saat melakukan proses pemilihan agar menjaga ukhuwah islamiyah dan menjauhkan diri dari caci maki dan adu domba.

4. *Money Politics*

Dewan Syari'ah memberikan artikulasi *money politics* merupakan penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, dapat pula berupa uang untuk khidmah kepada masyarakat, agar suatu akan memihak kepadanya jika ada pengambilan keputusan.¹² Suap (*money politics*) yang kemudian muncul dalam masyarakat dengan wajah sodaqoh atau hadiah atas balas budi suatu

¹¹ *Ibid.*, hlm. 60.

¹² *Ibid.*, hlm. 62.

tindakan tertentu (yang bertentangan dengan *syar'i*). Tindakan semacam ini juga pernah terjadi dalam masa Rasulullah sehingga beliau bersabda :

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأحد شفاعاً فأهدى له هدية قبلها فقبلها منه فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا (رواه أحمد)

Artinya : “Dari Abu Umamah ra. Nabi SAW. bersabda ‘barang siapa yang memberikan satu rekomendasi untuk seseorang kemudian ia memberikan hadiah atas rekomendasi tersebut lalu ia menerima hadiah tersebut, maka ia telah mendatangi pintu riba yang besar” (HR. Ahmad)

Selain hadits diatas Dewan syari’ah juga memaparkan satu kaidah ushiliyah yang berbunyi :

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

“Sesuatu yang diharamkan untuk diambil, maka diharamkan pula untuk diberikan.”

Berdasarkan beberapa dalil diatas Dewan Syari’ah PKS memfatwakan bahwa *money politics* adalah diharamkan, baik yang melakukan maupun yang menerimanya.¹³ Sesuai dengan firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .. ﴿المائدة : ٢﴾

Artinya : “.....Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.....” (QS. Al-Maidah : 2)¹⁴

¹³ Fatwa Dewan Syari’ah No. 03/F/K/DS-PKS/1424.

¹⁴ Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hlm. 157.

BAB IV

**ANALISIS PERAN DEWAN SYARI'AH PARTAI KeadILAN
SEJAHTERA (PKS) DALAM PENERAPAN ETIKA BERPOLITIK**

**A. Peran Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera sebagai Lembaga
Fatwa Kaitannya dengan Penerapan Etika Berpolitik**

Citra positif yang melekat pada PKS tentunya tidak lepas dari peranan Dewan Syari'ah yang merupakan lembaga fatwa partai sekaligus sebagai lembaga yang menjadi rujukan umat.¹ Berdasarkan pengamatan penulis, dari beberapa partai yang berbasis Islam yang tampil dalam pemilu 2004 silam, hanya PKS yang memiliki komposisi struktural yang berbeda. Yakni selain ada dewan Syura, Dewan Pengurus Pusat, juga ada Dewan Syari'ah. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Mahmud Mahfudz, LC. bahwa yang melatarbelakangi adanya Dewan Syari'ah di PKS adalah karena PKS sendiri merupakan partai dakwah yang menuntut kader-kadernya profesional serta tetap berpegang pada *syari'at* Islam. Maka disini sudah seharusnya tugas Dewan Syari'ah dengan segenap komposisinya bertugas mengawal kader-kadernya agar tetap dalam *spirit syar'i*.²

Mengingat kedudukan Dewan Syari'ah yang independen, dalam artian diluar struktur pengurus harian partai (DPP, DPW dan DPD), membuat citra independensi lembaga ini tampak *logis*. Bahkan Dewan Pimpinan Tingkat

¹ Merupakan visi yang diusung oleh Dewan Syari'ah Pusat periode 2005-2010 dibawah pimpinan DR. Surahman, MA. lihat <http://pks-online.org>

² Hasil wawancara dengan Mahfudz Mahmud (ketua Dewan Syari'ah Wilayah Jateng periode 2005-2010), Kamis, 28 Desember 2006.

Pusat (DPTP) tidak dapat mencampuri, intervensi atau membatalkan keputusan Dewan Syari'ah Pusat tentang fatwa dan qadha yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Pusat (pasal 14 item 5 ART-PKS).

Kalau melihat kekuatan hukum secara legal formal, fatwa bukanlah sebuah ketentuan hukum yang mempunyai *punishment* terhadap orang yang melanggarnya. Kekuatan fatwa lebih pada ikatan moral yang membutuhkan tingkat kesadaran dan ketaatan penuh terhadap komunitas yang memandang fatwa tersebut penting. Semisal fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), hanya menjadi penyeimbang wacana yang muncul akibat kebijakan pemerintah. Salah satu contoh penyikapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta pemerintah meninjau ulang Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Sebab, pelaksanaan Perpres tersebut sering mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Namun, yang terjadi hingga saat ini adalah Perpres tersebut tetap berlegang dan digunakan sebagai alat penggusuran kaum marginal.

Kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak 20 April 2002 ternyata mampu memberi warna dalam percaturan politik. Dalam ingatan publik, PKS merupakan partai dakwah yang profesional, kritis, memiliki kader militan dan terlebih lagi santun dalam berpolitik. Fenomena menjamurnya partai Islam pada pemilu 2004³ membuat umat Islam (khususnya) dipaksa berpikir ulang dalam menentukan pilihan dan dukungan terhadap tokoh yang diusung oleh partai-partai Islam.

³ Partai yang berbasis Islam pada pemilu 2004 adalah Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nahdhotul Ulama Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bintang Reformasi.

Citra positif yang masih melekat dalam tubuh PKS hingga saat ini, tidak terlepas dari peran Dewan Syari'ah yang selalu memberikan arahan dan pembinaan kader-kadernya dalam berpolitik. Dalam pentas panggung politik Indonesia, popularitas PKS semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah simpatisan dan perolehan suara dalam pemilihan umum 1999-2004 (perolehan suara meningkat 5,98%).⁴ Ini merupakan angka yang mengejutkan khususnya bagi partai-partai yang berbasis Islam, dimana rata-rata kenaikan yang diperoleh oleh partai tersebut hanya 1 hingga 3 persen saja. Walaupun penulis sendiri yakin bahwa dibalik kesuksesan PKS dalam mendulang suara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intern partai saja, namun ada faktor ekstern yang lebih menentukan. Faktor itu adalah tumbangnya orde baru dan adanya reformasi sistem kepartaian.⁵

Peran, merupakan apa yang diharapkan seseorang dari status tertentu. Sebagaimana dengan visi Dewan Syari'ah periode 2005-2010 dibawah Pimpinan DR. Surahman Hidayat, MA. yaitu "Menjadi lembaga yang bisa menjadi rujukan ummat",⁶ membuat peran yang diemban oleh Dewan Syari'ah menjadi sangat berat. Karena Dewan Syari'ah dituntut untuk dapat menyelesaikan semua problematika yang dihadapi ummat Islam dengan kompleksitas persoalan yang tinggi (termasuk masalah politik).

Disini penulis membagi peran Dewan Syari'ah ke dalam dua kategori, yang meliputi peran intern dan peran ekstern.

⁴ Suara yang dikantongi PKS dalam pemilu 2004 sebesar 8.325.020 (7,34 %), sedangkan dalam pemilu 1999 hanya memperoleh 1.436.565 (1,36 %) dan jika dikalkulasi perolehan suara PKS mengalami peningkatan sebesar 5,98 % dari pemilu sebelumnya.

⁵ Yaitu diberlakukannya sistem multi partai dan keluarnya UU No. 31 tahun 2002.

⁶ <http://www.pks-online.org>

1. Peran Intern

Peranan Dewan Syari'ah di intern partai adalah selain sebagai wadah pembinaan kader juga memberikan *ta'shil syar'i* terhadap kebijakan partai dan mengawasi pelaksanaannya, memberikan jawab dan solusi syar'i terhadap berbagai masalah yang dihadapi partai dan anggotanya. Termasuk bertanggung jawab memberikan pembinaan atau pelatihan terhadap Dewan Syari'ah dibawah garis strukturalnya. Semua itu bertujuan agar semua aktifitas kader tetap dalam koridor *syari'at* Islam.

Selain memberikan *ta'shil syar'i*, Dewan Syari'ah juga bertanggung jawab terhadap pengawasan atas aplikasi *syar'i* dalam perilaku kader-kader PKS. Walaupun Pengawasan ini melibatkan seluruh komponen Dewan Syari'ah, mulai dari tingkat pusat (DSP), wilayah (DSW) sampai tingkat daerah (DSD). Jika anggota Dewan Syari'ah mendapati kader yang menyimpang atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam seperti melakukan suap, penipuan, dan pembohongan publik dalam berkampanye. Maka Dewan Syari'ah berhak memberikan teguran atau peringatan bahkan Dewan Syari'ah mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi agar kader yang bersangkutan dikeluarkan dari partai.⁷

Sejauh ini Dewan Syari'ah belum pernah memberikan sanksi berat (dikeluarkan kader dari partai). Hal ini dikarenakan karena belum pernah ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh kader-kader PKS. Pelanggaran

⁷ Hasil wawancara dengan Mahfudz Mahmud (ketua Dewan Syari'ah Wilayah Jateng periode 2005-2010), Kamis, 11 Januari 2007.

yang pernah terjadi hanya pelanggaran ringan (hal-hal yang bersifat privasi, seperti melakukan pacaran atau kholwat). Jika salah satu kader terbukti melakukan pelanggaran semacam itu, mereka hanya diberi teguran dan sanksi seperti membaca *istighfar* 100 kali, membaca al-Qur'an dan diminta datang kepada senior untuk diberi pencerahan spiritual.⁸ System control yang dimulai dari hal-hal sederhana dan bersifat mikro inilah yang kemudian diharapkan dapat berpengaruh makro bagi penerapan etika dalam berpolitik.

Adanya sistem kontrol yang ketat, sangat berdampak terhadap kualitas kader dan citra partai. Adanya aturan dalam setiap partai memang tidak bisa dinafikan, setiap partai pasti mempunyai *seabrek* aturan dan lembaga pengkaderan yang memberikan koridor-koridor yang tidak boleh dilanggar oleh kader. Namun fakta di lapangan akan membuktikan segalanya, apakah kader-kader itu mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan atau mereka mengabaikannya demi *private interest*.

2. Peran Ekstern

Peran inilah yang mempunyai pengaruh dalam peningkatan citra PKS di pentas politik Indonesia. Wujud konkrit Dewan Syari'ah dalam pentas politik diantaranya memberikan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan perilaku politik seperti dalam pelaksanaan kampanye, fatwa tentang partisipasi artis dan tokoh dalam kampanye.

⁸ Hasil wawancara dengan Mahfudz Mahmud (Ketua Dewan Syari'ah Wilayah Jateng periode 2005-2010) dan Ketua DPC-PKS Ngaliyan, Senin, 5 Februari 2007.

Selain memberikan fatwa, Dewan Syari'ah juga melibatkan diri untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi ummat (diluar partai). Dalam hal ini peran Dewan Syari'ah hanya sebatas memberikan pencerahan (*bayanat*) terhadap masyarakat, seperti keterlibatan Dewan Syari'ah dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.⁹ Sarana yang digunakan dalam pemberian *bayanat* biasanya lewat tabligh, seminar, dan dialog keagamaan.

Kalau melihat tugas DSP, maka tugas ini amat berat dan mulia. Berat karena harus menjelaskan tentang halal dan haram serta menjawab setiap permasalahan terkait syari'ah yang dihadapi partai, kader dan umat Islam secara umum. Mulia, karena Allah telah menjanjikan *derjat* yang tinggi bagi orang-orang yang telah memberikan pemahaman keagamaan pada ummat.¹⁰ Persoalan manusia bermacam-macam jenisnya, meliputi berbagai bidang ilmu dan mereka diharapkan mampu memberikan jawaban *syar'i* atas persoalan-persoalan itu. Bahkan jawaban-jawaban dari Dewan Syari'ah periode telah dibukukan. Berikut daftar fatwa-fatwa yang telah dibukukan :

Judul buku : “Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera”

⁹ <http://pk-sejahtera.org>

¹⁰ Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta : Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2005, hlm. viii.

No	Materi Fatwa
1	Shalat dan adab musyafir
2	Menggerakkan telunjuk dalam tasyahud
3	Shalat istisqa'
4	Shalat tarawih
5	Qiyamullail berjamaah diluar Ramadhan
6	Awal Ramadhan Idul fitri dan Idul Adha
7	Takbiran di hari Idul fitri dan Idul Adha
8	Qunut nazilah
9	Muhasabah di tahun baru Masehi
10	Hukum tahlilan dalam Islam
11	Zakat fitrah
12	Bayan zakat profesi
13	Zakat hasil ceramah
14	Zakat karyawan untuk usaha
15	Puasa bagi wanita hamil, menyusui dan anak-anak
16	Masalah khilafiyah
17	Pernikahan aktivis kampus
18	Nikah setelah berzina
19	Sumpah untuk melakukan maksiat
20	Jabat tangan antara pria dan wanita
21	Bisnis BBA dan Rent a Car
22	Bai'ul wafa
23	Bisnis MLM
24	Meminjam di bank konvensional
25	Future trading
26	Hukum menerima hadiah bagi anggota DPR/DPRD
27	Riswah dalam Islam
28	Beasiswa dari bank konvensional
29	Deposito di bank konvensional
30	Dana riba untuk aktivitas partai
31	Riba dan bunga bank
32	Muamalah yang mengandung riba
33	Wanita bekerja dan tampil di muka umum
34	Keterlibatan akhwat di pengurus DPP
35	Penitipan anak dalam Islam
36	Mukhoyyam akhwat
37	Seni pentas
38	Keterlibatan para da'I dalam dunia film
39	Menonton film di bioskop
40	Konsep sakit dan sehat dalam Islam
41	Transplantasi organ tubuh manusia
42	Pengobatan dengan cara rukyah
43	Lagu dan musik

44	Partai politik dalam Islam
45	Koalisi dan aliansi menurut Islam
46	Oposisi dalam Islam
47	Tadzkirah tentang presiden wanita
48	Demonstrasi dalam Islam
49	Etika kampanye dalam Islam
50	Jihad dalam Islam

Buku ini diterbitkan karena adanya tuntutan moril dari simpatisan PKS untuk mengetahui jawaban *syar'i* atas problematika yang sedang mereka hadapi. Ini merupakan salah satu wujud reaktif Dewan Syari'ah dalam menyelesaikan masalah ummat. Namun penulis memberikan catatan dalam buku tersebut, *problem solving* yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah cenderung kepada masalah *ubudiah dan fiqh*. Dan hanya sebagian kecil saja yang bersinggungan dengan ruang publik atau masuk dalam ranah kebijakan publik seperti pembahasan RUU.

Kembali kepada DSP yang bertugas merumuskan landasan *syar'i* terhadap partai dalam melaksanakan aktifitasnya dan memberikan jawaban *syar'i* terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi partai dan anggotanya serta masyarakat, ketimbang hanya menjawab masalah-masalah seperti khilafiyah, jabat tangan pria wanita, dll, DSP seharusnya memberikan landasan *syar'i* untuk Anggota Legislatif (*aleg*) PKS yang berjuang di parlemen dalam membahas RUU dan memperjuangkan garis-garis landasan yang sudah ditetapkan oleh DSP itu di DPR.

Walaupun setiap *aleg* sekurang-kurangnya dibantu oleh asisten pribadi yang tentunya bukan pakar-pakar dibidang yang dihadapi oleh *aleg-aleg* itu. Namun, terkadang *aleg* juga mengalami kerepotan karena

selain harus menghadapi debat dengan lawan-lawan politiknya dalam memperjuangkan aspirasinya, juga harus mencari sumber informasi mengenai topik-topik yang sedang dibahas. Selain harus menghadapi lawan politik dari parpol lain, *aleg* juga harus menghadapi 'lawan' dari pemerintah, yang biasanya berisi pejabat-pejabat karir yang sudah puluhan tahun bekerja di bidang itu (level Dirjen), maka sudah seharusnya *aleg-aleg dibackup* oleh sebuah konsep yang matang, yang juga memiliki landasan syar'i yang kuat.¹¹

Siapa yang seharusnya membuat *backup* konsep tersebut ?, kalau melihat AD/ART PKS, maka yang bertugas untuk itu adalah Dewan Syari'ah. Karena itulah peneliti memandang dari pada sibuk mengurus masalah seperti diatas, lebih baik sumber daya yang ada di Dewan Syari'ah itu diarahkan untuk memikirkan landasan *syar'i* bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh *aleg-aleg* PKS di DPR. Sehingga tidak terjadi lagi adanya *aleg* PKS yang justru menjadi juru bicara atau pengusung sebuah RUU yang sarat dengan muatan atau pesanan dari pihak kapitalis.¹²

Kondisi ini terjadi karena PKS menyatakan diri sebagai pendukung Pemerintah, sehingga daya kritis para anggota Dewan-nya terkesan mandul. Bahkan, untuk beberapa kebijakan tertentu, terkesan sudah tidak memiliki *sense* terhadap kondisi masyarakat. Hal ini terlihat dari persetujuan Fraksi PKS terhadap perubahan anggaran, dimana salah satu poinnya adalah kenaikan harga BBM.

¹¹ <http://pkswach.blogspot.com>

¹² *Ibid.*

Penulis memahami bahwa 45 kursi di DPR memang tidak dapat menjamin untuk menciptakan *policy*, namun tidak menutup kemungkinan jika 45 orang ahli diplomasi mampu mempengaruhi 550 orang yang tersebar dalam beberapa komisi.

Walaupun Peran Dewan Syari'ah dalam memberikan sentuhan *syar'i* terhadap kebijakan publik hanya sebatas wacana, namun perannya dalam *menggembleng* kader-kadernya yang duduk dalam kursi Legislatif cukup membanggakan. Mereka tetap berpegang pada fatwa-fatwa yang diberikan oleh Dewan Syari'ah seperti larangan praktek *money politic* yang kerap dilakukan oleh Anggota Dewan.¹³

Contoh konkrit yang dilakukan oleh kader-kader PKS adalah sikap *aleg* dalam menyikapi PP No. 37 tahun 2006. Walaupun sebagian *aleg* yang ada di beberapa daerah sudah ada yang menerima uang tunjangan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 37 tahun 2006. Namun mereka tidak berani menggunakan uang tersebut. Kader-kader PKS memberikan dua penyikapan. Pertama, mereka mengembalikan uang tersebut ke kas daerah. Kedua, mereka menerima namun mereka mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan rakyat (santunan publik).¹⁴

¹³ Banyaknya praktek *money politic* yang dilakukan oleh anggota Legislatif yang menyebabkan citra DPR buruk dan korup. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Transparation International Indonesia (TII) dan Global Corruption Barometer (GCB) yang menunjukkan bahwa DPR merupakan lembaga terkorup di Indonesia pada 2006. lihat Editorial, "Lembaga Paling Korup", *Media Indonesia*, Senin, 11 Desember 2006.

¹⁴ "FPKS Mengikuti Instruksi Pusat" dalam *Wawasan*, 17 Januari 2007.

B. Kerangka Berfikir PKS Kaitannya dengan Moralitas Politik Islam.

Mengapa partai Islam tidak bisa bersatu, tema itu merupakan diskusi panjang yang hingga saat ini masih menghantui politisi Islam Indonesia. Cita-cita untuk menyatukan partai Islam itu menjadi runtuh ketika dibenturkan dengan issue demokrasi dan kepentingan pribadi. Kegagalan PPP pada orde baru dapat dianggap sebagai pengalaman buruk dan penyebab kegagalan partai Islam dalam menciptakan *clean government*. Padahal kalau kita menengok sejarah kelahirannya, pada tahun 1973 PPP merupakan fusi dari beberapa partai Islam (NU, PSII, Perti dan Permusi).

Ternyata kekecewaan masyarakat tidak sampai disini, ketika reformasi digulirkan dan diterapkannya sistem multi partai pada pemilu 1999 ternyata tidak jauh dari rezim sebelumnya. Kondisi negeri malah terpuruk, korupsi merajalela, angka pengangguran dan kriminalitas meningkat. Indikasi inilah yang menyebabkan masyarakat makin tidak percaya terhadap sebagian partai, sehingga menyebabkan penurunan jumlah suara di beberapa partai seperti PDIP, Golkar, PAN, PBB dan PPP.¹⁵

Salah satu partai yang meningkat popularitasnya lima tahun terakhir (1999-2004) adalah PKS. Kehadiran PKS seolah-olah menjadi *oase* bagi masyarakat akan pemenuhan sebuah etika politik. Ditengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap etika partai politik, Partai Keadilan Sejahtera tampil dengan membawa isu moral dan menunjukkan etika politik yang santun dalam

¹⁵ *Kompas*, 10 April 2004

aksi dan gerakan politiknya.¹⁶ Kalau melihat sejarah keberadaannya pun Partai Keadilan Sejahtera merupakan upaya sebuah komunitas yang ingin memasuki dimensi politik sebagai bagian dari dimensi-dimensi kehidupan manusia, sekaligus menjadi cermin aktualisasi universalitas Islam dalam rangka mewujudkan keseimbangan hidup. Oleh sebab itu mereka memandang bahwa partai politik merupakan sarana yang efektif dalam upaya mewujudkan sebuah struktur masyarakat muslim.¹⁷

Isu moral yang diusung oleh PKS ternyata tidak hanya isapan jempol, sebagai partai Islam tentunya moralitas yang dibangun PKS adalah moralitas yang berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam. Yaitu prinsip-prinsip sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an dan hadits, diantaranya mengenai prinsip untuk menjadikan kekuasaan sebagai amanah (kepemimpinan), musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, perdamaian dan keselamatan, kesejahteraan masyarakat dan ketaatan rakyat. Walaupun Islam sendiri tidak menerangkan mengenai ajaran moralitas politik secara eksplisit, namun roh-roh perilaku politik yang diwakili oleh pembelaan kepentingan publik telah diterangkan dalam Islam.

Prinsip-prinsip itulah yang kemudian menjadi dasar pijakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk melangkah dalam pentas politik nasional. Sehingga tidak salah dengan formalitas Islam yang dinyatakan secara eksplisit sebagai identitas, label dan simbol PKS.

¹⁶ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera; Idiologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Teraju, 2004, hlm. 106.

¹⁷ *Ibid.*

Yang perlu dilakukan oleh partai-partai Islam adalah bagaimana para pemimpin-pemimpin mereka melakukan gerakan transformasi dan reformasi total. Yaitu melakukan perubahan pada tingkat kultur dan struktur kepartaian yang tidak hanya mengandalkan simbol-simbol Islam. Akan tetapi lebih mengutamakan modernitas, esensialitas dan substantialis.¹⁸

Implementasi nilai-nilai nalar politik itu dapat berwujud pada visi-misi partai. Sehingga bobot kebaikan dan nilai-nilai keunggulan Islam dapat diterapkan dalam setiap aksi politik. Salah satu contoh aplikasi nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam PKS adalah pada aksi-aksi damai yang selama ini mereka lakukan. Seperti yang dilakukan dalam aksi penolakan kedatangan Presiden AS. Dalam aksi yang melibatkan puluhan ribu kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berlangsung tertib.¹⁹

Tidak hanya itu, dalam mengemas kampanye PKS pun berbeda dengan partai-partai lain bahkan partai Islam lainnya. PKS lebih mengedepankan orasi politik dan dialog dengan simpatisan. Sedangkan kalau kita menilik partai lain, mereka masih menggunakan cara-cara kuno seperti pentas musik dangdut. Bagi mereka yang penting massa bisa berkumpul banyak dan mereka dapat menyampaikan janji-janji dengan harapan massa terpengaruh dan berdampak pada perolehan suara dalam pemilihan umum. Deskripsi inilah yang kemudian mampu merubah paradigma kampanye yang selama ini cenderung hura-hura, anarkis, menjadi kampanye yang damai, tertib dan mendidik. PKS memandang bahwa kampanye merupakan salah satu

¹⁸ Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur*, Jakarta : Badan Litbang Agama dan Duklat Keagamaan Departemen Agama RI., 2002, hlm. 133.

¹⁹ *Kompas*, 19 November 2006.

sarana Dakwah yang efektif sekaligus sebagai sarana dalam menyampaikan program-program partai. Dasar *qur'ani* yang mereka gunakan sebagai pegangan adalah firman Allah surat An-Nahl : 125 yang berbunyi :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿النحل: ١٢٥﴾

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” (QS. An-Nahl : 125)²⁰

Dewan Syari'ah juga memberikan rambu-rambu bagi kader-kadernya dalam berkampanye agar tidak keluar dari syari'at Islam, diantaranya :

1. Ikhlas dan membebaskan diri dari motivasi rendah.
2. Menampilkan partai dan menyampaikan program-programnya dengan cara yang sebaik-baiknya (*ihsan*).
3. Tidak memaksa.
4. Tidak jatuh pada dusta/bohong.
5. Tidak mengucapkan janji secara berlebihan.
6. Tidak jatuh dalam *ghibah*, caci maki dan cemooh.
7. Tetap menjaga rasa *ukhuwah Islamiyah*.
8. Tidak memuji-muji diri sendiri.
9. Memberikan kemaslahatan bagi bangsa.
10. Dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu pihak lain.

²⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Al-Waah, 1993, hlm. 421.

11. Selalu ingat akan kewajiban utama.

12. Memberi keteladanan yang baik.

Konsep perilaku politik PKS yang selama ini dianggap santun dan tertib merupakan manifestasi dari peranan Dewan Syari'ah melalui fatwa-fatwanya. Bahkan Dewan Syari'ah sendiri sampai mengeluarkan buku “Fatwa Jihad Siyasi” sebagai pedoman partai agar tetap dalam warna dan koridor *syar'i*. Fatwa tersebut meliputi : etika kampanye dalam Islam, kampanye dengan pendekatan budaya, partisipasi artis dan tokoh dalam kampanye, partisipasi politik masyarakat, Larangan golput, Money politik dan fatwa caleg dan pengurus PKS non muslim. Fatwa itu merupakan wujud proaktif Dewan Syari'ah terhadap kondisi politik Indonesia, dimana partai politik mulai kehilangan identitas dan masyarakat tidak lagi percaya dengan institusi yang partai politik.²¹

Dengan fatwa tersebut PKS tidak hanya mengajak kepada kader-kader PKS saja, namun kepada semua partai khususnya partai yang berbasis Islam untuk tetap menjaga identitas keislaman dan tetap berpegang pada ajaran-ajaran Islam, tidak terjebak pada motif yang rendah (uang dan jabatan) dan untuk kepentingan sesat yang berdampak pada hilangnya reputasi individu, institusi dan Agama.

Sebenarnya, para politikus sendiri kalau mau menganalisa perilaku dan tindakan mereka akan sadar bahwa mereka cenderung menjauh dari prinsip-prinsip yang menjadi struktur dalam pemikiran politik dan dari nilai-

²¹ Warjio, *Refleksi Pilihan Raya 2004*, Makalah Seminar yang diselenggarakan Islamic Development Management Project (IDMP), Universti Sains Malaysia , 26 April 2004

nilai luhur yang mereka yakini. Penyebab kecenderungan tersebut dikarenakan oleh obsesi mereka yang over, sehingga mereka terperosok kedalam cara-cara naif yang bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri.

Untuk itulah PKS lewat Dewan Syari'ah mencoba merefleksikan norma-norma yang bersumber dari ajaran agama kedalam dunia politik praksis. Dengan kata lain mereka membuat sintesa antara *deyure* dan *defacto*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis sampaikan beberapa poin kesimpulan yang merupakan inti dari uraian pembahasan skripsi di atas, yang antara lain :

1. Dibalik kesuksesan PKS tidak lepas dari peran Dewan Syari'ah yang selalu memberikan arahan dan pembinaan kader-kadernya agar tetap berpegang pada prinsip *syar'i* dalam berpolitik. Dewan Syari'ah pula yang bertanggungjawab penuh terhadap kualitas kader agar senantiasa taat terhadap syari'at Islam. Sebagaimana visi Dewan Syari'ah "Menjadi lembaga yang bisa menjadi rujukan ummat", Dewan Syari'ah berusaha menjadi *problem solving* ummat dengan segala problematika yang dihadapi dalam rangka Dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Misi tersebut yang kemudian menjadikan Dewan Syari'ah justru kurang efektif dan kurang menyentuh terhadap ruang publik. Kebanyakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *ubudiyah* yang seharusnya peran ini dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. Kehadiran PKS seolah-olah menjadi *oase* bagi masyarakat akan pemenuhan sebuah etika politik. Di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap etika partai politik, PKS tampil dengan membawa isu moral dan menunjukkan etika politik yang santun aksi dan gerakan politiknya. Aksi

politik yang dilakukan oleh kader dan simpatisan PKS seolah-olah memberi teladan publik untuk bersikap santun dan tetap berpegang pada ajaran-ajaran Islam. Dewan Syari'ah juga mengajak kepada partai-partai Islam lainnya agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Sehingga partai Islam mempunyai identitas yang jelas dan tidak sebatas pada simbol-simbol Islam.

B. Saran-saran

Setelah mengkaji tentang peran Dewan Syari'ah terhadap penerapan etika berpolitik, penulis memberikan saran :

1. Dewan Syari'ah yang bertugas memberikan *ta'shil syar'i* terhadap kebijakan partai dan mengawasi pelaksanaannya, lebih mengedepankan perhatiannya pada ruang publik. Seperti memberikan warna *syar'i* terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah melalui Anggota Legislatif.
2. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap partai politik dikarenakan perilaku mereka sendiri yang arogan dan mengenyampingkan etika dan moralitas politik. Alangkah baiknya setiap partai mempunyai lembaga semacam Dewan Syari'ah yang bertugas sebagai pengontrol dan *spionase* dalam penerapan etika berpolitik.

C. Penutup

Tidak ada kata yang pantas bagi seorang hamba yang dikaruniai nikmat kesehatan dalam menyelesaikan karya tulisnya, selain ucapan tasbih, tahmid, dan takbir serta syukur dihadapan Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Dalam menulis skripsi ini penulis sadar bahwa karya ini bukanlah sebuah kajian yang komprehensif yang tentunya masih banyak kekurangan, namun yang pasti bahwa semua itu bukanlah merupakan tujuan penulis. Tetapi kekurangan tersebut merupakan bukti keterbatasan kemampuan penulis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi benar, jika ada pepatah yang mengatakan “*tidak ada gading yang tak retak*”, itulah kenyataan yang penulis alami.

Akhirnya penulis sangat mengharapkan sekali saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca untuk mengoreksi, dalam rangka menuju masa depan keilmuan yang lebih matang dan maju. Besar harapan kami, semoga skripsi yang sederhana ini akan memberikan manfaat untuk penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mu'is Ruslan, Utsman, *Al-Tarbiyah As-Siyasiyah 'Inda Jama'ah Al-Ikhwah Al-Muslimin*. Terj. Salafuddin Abu Sayyid, et al., "Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin", Solo : Era Intermedia, 2000
- Al-Ghazali, *Ihya al-Ulum al-Din*, Bairut : Dar al-Kutub al-Islam, juz. 2, tt.
- al-Maududi, Abul A'la, *Al-Khilafah wa al-Mulk*. Terj. Muhammad al-Baqir, Bandung : Mizan, cet. VI, 1996
- A. Somali, Mohammad, *Relativisme Etika; Menyisir Perdebatan Hangat dan Memetik Wawasan Baru Tentang Dasar-dasar Moralitas*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Baasir, Faisal, *Etika Politik; Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Damanik, Ali Said, "*Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Cet. II, Jakarta : Teraju, 2003
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Al-Waah, 1993
- Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta : Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2005
- Fadholi, Ahmad, "Kepemimpinan dalam Partai Keadilan Sejahtera (Studi Tentang Penentuan Kriteria Presiden menurut Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu 2004)", Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.t.d
- Fanani, Ahwan, "Sikap Aktivis Partai Keadilan Sejahtera Semarang Terhadap Kebangsaan, Demokrasi dan Budaya Lokal", Semarang : Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2006, t.d.
- Furkon, Aay Muhammad, *Partai Keadilan Sejahtera; Idiologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Teraju, 2004
- Gunawan, Asep, (ed.), *Artikulasi Islam Kutural dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Hari Murti Kridalaksana, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. II, Jakarta : Balai Pustaka, 1991

Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2003

<http://pks-online.org>

<http://pkswach.blogspot.com>

<http://www.PK-Sejahtera.org>

Huntington, Samuel P., *Political Order in Changing Societies*. Terj. Sahat Simanora dan Suryatim “Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Ismail, Faisal, *Pijar-Pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur*, Jakarta : Badan Litbang Agama dan Duklat Keagamaan Departemen Agama RI., 2002

Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Researc Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990

Kompas, 10 April 2004

-----, 19 November 2006.

-----, Edisi 01 Juni 2005.

-----, Edisi 19 November 2006.

Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Madjid, Nurcholis, *Cita-Cita Politik Islam Era Revormasi*, Jakarta: Paramadina, 1999

Magnis Suseno, Franz, *Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Cet. I, Yogyakarta : Kanisius, 1987

Makmurtono, Agus dan Munawir, *Etika (Filsafat Moral)*, Cet. 1, Jakarta: Wira Sari, 1989

Media Indonesia, 11 Desember 2006.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. II, Jakarta : Lentera Hati, 2005
- Soehoet, A.M. Hoeta, *Etika dan Kode Etik Komunikasi*, Jakarta : Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, 2002
- Suara Pembaruan, 3 Agustus 2005
- Swasono, Sri Edi, et.al., *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan; Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam*, Jakarta : UI Press, 1987
- Syamsuddin, Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2002
- Thompson, Dennis F., *Political Ethics and Public Office*, Terj. Benyamin Molan, "Etika Politik Pejabat Negara", Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Warjio, *Refleksi Pilihan Raya 2004*, Makalah Seminar yang diselenggarakan Islamic Development Management Project (IDMP), Universti Sains Malaysia , 26 April 2004
- Wawasan, 17 Januari 2006.
- Yusuf, Buchori H., (ed.), *Fatwa Jihad Siyasi*, Jakarta : Mitra Grafika, 2004